

SKRIPSI

**ANALISIS POLA PENJATUHAN PIDANA DAN DISPARITAS PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER
(Studi di Pengadilan Militer I-03 Padang)**

Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

MHD. FARUQ ANRUSEFI

2110113057

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

NO.REG: 18/PK. IV/IV/2025



No. Alumni Universitas	MHD. Faruq Anrusfi	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Sawahlunto Sijunjung/ 27 September 2002	f. Tanggal Lulus : 31 Juli 2025	
b. Nama Orangtua : ST.M. Taufik Rusmiyati	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	
d. PK : Hukum Pidana	i. IPK : 3,79	
e. No. BP : 2110113057	j. Alamat : Komplek Perumahan Sikabau Permata Indah Blok B 10, Tanjung Salilok. Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya .	

**ANALISIS POLA PENJATUHAN PIDANA DAN DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER
(Studi di Pengadilan Militer I-03 Padang)**

(MHD. Faruq Anrusfi, 2110113057, Hukum Pidana (PK IV) Fakultas. Hukum Universitas Andalas, 163 Hlm, 2025)

ABSTRAK

Tindak Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus meningkat meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memperberat ancaman pidananya. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan disparitas dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola penjatuhan pidana serta disparitas putusan dalam perkara pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Militer I-03 Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang, serta bersumber dari data sekunder yang diolah melalui teknik editing dan coding. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dalam dua perkara, yaitu Putusan Nomor 92-K/PM.I-03/AD/VIII/2018 dan Nomor 41-K/PM.I-03/AD/V/2022. Dalam putusan tersebut, terdakwa divonis berdasarkan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UUPA (membujuk anak melakukan perbuatan cabul), padahal fakta perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan terhadap anak. Dari sisi modus, pidana lebih berat dijatuhkan pada terdakwa yang menggunakan pemaksaan. Faktor riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi juga memengaruhi, di mana terdakwa dengan masa pengabdian lebih lama di TNI justru menerima hukuman lebih berat, termasuk denda yang tidak proporsional dengan penghasilan pokok. Dampak terhadap korban dan status sosial terdakwa (misalnya hubungan keluarga dengan korban) turut menjadi pertimbangan dalam pemberatan hukuman. Disparitas signifikan tampak dalam beratnya pidana penjara, besaran denda, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pemecatan dinilai subjektif karena tidak adanya pedoman jelas mengenai kelayakan terdakwa untuk dipecat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar majelis hakim lebih cermat dalam menerapkan asas hukum pidana, disusun pedoman pembedaan yang terukur, serta mendorong agar perkara pidana umum yang melibatkan anggota militer diperiksa di pengadilan negeri.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencabulan, Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak, Militer.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 31 Juli 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
MHD. Faruq Anrusfi	Efren Nova, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	MHD. Faruq Anrusfi	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Sawahlunto Sijunjung/27 th September 2001 b. Parents' Name : ST. M. Taufik Rusmiyati c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2110113057	f. Graduation Date : July 31 st , 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 Years 11 Month i. GPA : 3,79 j. Address : Komplek Perumahan Sikabau Permata Indah Blok B 10, Tanjung Salilok, Sikabau, District. Pulau Punjung, Regency. Dharmasraya	

**ANALYSIS OF SENTENCING PRACTICES AND DISPARITIES IN CASES INVOLVING THE SEXUAL
EXPLOITATION AND RAPE OF MINORS BY MILITARY PERSONNEL**

(A Case Study of Military Court I-03 Padang)

(MHD. Faruq Anrusfi, 2110113057, Criminal Law (PK IV) Faculty of Law, Andalas University, 163Pages, Year 2025)

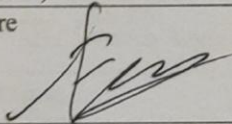
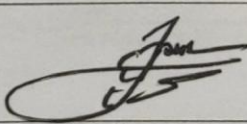
ABSTRACT

Sexual Sexual abuse and rape against children remain serious criminal offenses in Indonesia, with a concerning upward trend despite the enactment of Law No. 35 of 2014, which introduced harsher penalties. In practice, however, disparities in sentencing persist. This study aims to describe the patterns of sentencing and examine sentencing disparities in child sexual abuse and rape cases adjudicated by the Military Court I-03 Padang. This research adopts a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, employing both case and statutory approaches. The data are derived from secondary sources and processed through editing and coding techniques. The findings reveal errors in the application of law in two cases, namely Decision No. 92-K/PM.I-03/AD/VIII/2018 and Decision No. 41-K/PM.I-03/AD/V/2022. In both cases, the defendants were convicted under Article 76E in conjunction with Article 82(1) of the Child Protection Act for persuading a child to engage in obscene acts, whereas the conduct more accurately constituted child rape. Sentences were generally more severe where the offense involved coercion. Other influential factors included the defendants' service record and socio-economic background, with longer-serving military members receiving heavier penalties, including fines disproportionate to their basic income. The severity of the impact on the victim and the defendants' social status such as family ties to the victim—also influenced the imposition of harsher sentences. Significant disparities were identified in terms of imprisonment, fines, and the imposition of additional penalties such as dismissal from military service. The latter sanction was applied inconsistently, largely due to the absence of clear guidelines in determining whether dismissal was appropriate, which raises concerns of judicial subjectivity and potential injustice. This study recommends that judges exercise greater precision in applying criminal law principles, that sentencing guidelines incorporating objective and subjective considerations be developed, and that general criminal cases involving military personnel be adjudicated in civilian courts.

Keywords: Criminal Offenses, Disparities in Punishment, Sexual Abuse, Rape, Military, Children

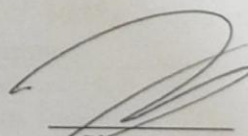
This minor thesis has defended in front of the examiner team at July 31st, 2025.

Examiner,

Signature	1.	2.
		
MHD. Faruq Anrusfi	Efren Nova, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: